

Strategi Sekolah dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Berbasis Perspektif Feminis Kritis: Studi Etnografi Kebijakan

Okta Rosfiani^{1*}, Ahmad Najihan Maulana², Muhamad Farhan³, Zakki an Nafis⁴,
Ammara Lutfatunnisa⁵, Cecep Maman Hermawan⁶

¹²³⁴⁵Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Banten, Indonesia, ⁶Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Banten, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 25 June 2026

Available online 22 July 2026

Keywords :

sexual violence in pesantren; policy ethnography; critical feminism; gender segregation; power relations.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Sexual violence in educational environments, including Islamic boarding schools (pesantren), is a serious issue that requires appropriate and timely prevention and response strategies. However, research on policy implementation in pesantren that apply complete gender segregation remains limited, particularly studies employing a critical feminist approach to uncover the power relations underlying such policies. This study aims to examine the prevention and response mechanisms for sexual violence at Madrasah Aliyah Ummul Qura Pondok Cabe and to analyze how the institution addresses patronal power relations within its existing policy framework. This ethnographic study was conducted through direct observation, in-depth interviews with madrasah principals, teachers, dormitory administrators, and students, as well as an analysis of institutional policy documents. The main findings reveal that complete gender segregation effectively reduces heterosexual violence but simultaneously creates new vulnerabilities in the form of same-sex violence within homogeneous dormitory environments. In response to this issue, the institution established Student Regulations and a Student Code of Ethics that are gender-neutral. The theoretical significance of this study lies in the deconstruction of the doctrine of students' absolute obedience to teachers or kiai through the

internalization of the principle la tha'ata li mahlukin fi ma'shiyatil khaliq, which empowers students to reject and report abuse committed by authority figures. In terms of response mechanisms, the institution implements a zero-tolerance policy through sanctions such as expulsion and direct reporting to the police in cases involving serious criminal offenses, prioritizing victims' justice over institutional reputation. The limitation of this study lies in its single-site scope; therefore, broader generalizations should be made with caution.

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah, termasuk pesantren, adalah masalah serius yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang tepat dan cepat. Namun, penelitian mengenai penerapan kebijakan di pesantren yang menerapkan pemisahan gender secara total masih kurang, terutama yang menggunakan pendekatan feminis kritis untuk mengungkap hubungan kekuasaan di balik kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari cara mencegah dan menangani kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Ummul Qura Pondok Cabe serta menganalisis bagaimana lembaga tersebut menguraikan hubungan kekuasaan patronal dalam kerangka kebijakan yang berlaku. Studi etnografi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, berbicara secara mendalam dengan para kepala madrasah, dewan guru, pengurus asrama, dan para santri, serta menganalisis berbagai dokumen kebijakan dari institusi tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa segregasi total berdasarkan gender ternyata berhasil memperkecil kekerasan heteroseksual, tetapi justru menciptakan kerentanan baru berupa kekerasan sesama jenis di lingkungan asrama yang homogen. Untuk menanggapi hal ini, diterbitkanlah Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Siswa yang tidak memihak gender. Signifikansi teoretis terletak pada dekonstruksi doktrin ketaatan absolut santri terhadap guru/kiai melalui penanaman prinsip la tha'ata li mahlukin fi ma'shiyatil khaliq yang memberikan agensi kepada santri untuk menolak dan melaporkan pelecehan oleh figur otoritas. Dalam aspek penanganan, institusi menerapkan zero tolerance dengan sanksi pemecatan atau pengeluaran serta pelaporan langsung ke kepolisian untuk kasus pidana berat, menempatkan keadilan korban di atas reputasi institusional. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokus tunggal sehingga generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi telah menjadi masalah besar yang mengganggu sistem pendidikan dan perlu segera diatasi. Secara umum, tempat belajar yang merupakan bagian dari sistem pendidikan resmi dan menerima siswa laki-laki serta perempuan secara bersamaan sering kali menjadi tempat terjadinya tindakan merendahkan atau menghina yang bersifat seksual antar siswa. Manifestasi kekerasan ini cukup rumit, mulai dari ucapan kasar seperti mencaci dan merendahkan, serta memandang seseorang dengan cara seksual, hingga tindakan fisik yang menganiaya seperti memaksa, menyentuh tanpa izin, hingga tindakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan.

Namun, skenario ini mengalami perubahan bentuk ketika masuk ke dalam lingkungan pendidikan Islam yang didasarkan pada pesantren, seperti Madrasah Aliyah (MA) Ummul Qura Pondok Cabe. Ciri khas dari institusi ini adalah adanya pemisahan jender yang sangat ketat, yaitu dengan memisahkan asrama, ruang kelas, dan kegiatan harian antara santri laki-laki dan santri perempuan. Konsep pembatasan ruang ini secara nyata berhasil mengurangi jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi antar kelompok gender berbeda, termasuk heteroseksual. Meski begitu, perspektif feminis kritis menilai bahwa ruang yang terpisah tidak selalu aman dari risiko yang mengancam. Tantangan baru muncul berupa risiko kekerasan seksual antar sesama jenis, yang bisa terjadi karena tingkat interaksi yang tinggi dalam satu ruang domestik asrama yang bersifat homogen selama 24 jam sehari.

Teori *Feminis Kritis* dalam analisis kebijakan tidak hanya melihat teks hukum secara tekstual, melainkan mengkritisi bagaimana relasi kuasa (*power relation*) bekerja di balik layar, bagaimana tubuh dikontrol, dan bagaimana korban bersuara. Di lingkungan pesantren, relasi kuasa sangat berlapis: hubungan patron-klien antara Kiai/Guru dan Santri, serta hierarki senior-junior. Isu yang belakangan mencuat di media mengenai kekerasan seksual oleh oknum pendidik menunjukkan adanya penyalahgunaan konsep ketaatan mutlak. Feminis kritis membedah hal ini sebagai bentuk opresi berbasis relasi kuasa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana MA Ummul Qura Pondok Cabe mendekonstruksi teks kebijakan dan memformulasikan strategi mitigasi yang adil, aman, dan responsif terhadap perlindungan tubuh siswa dari segala bentuk dominasi dan kekerasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang kekerasan seksual di institusi pendidikan biasanya fokus pada ruang yang terdapat laki-laki dan perempuan, di mana interaksi bebas antarjenis kelamin dianggap sebagai penyebab utama terjadinya pemukulan atau perlakuan tidak sopan, baik secara lisan maupun tindakan fisik yang memperkuat dominasi. Banyak literatur terkini menyepakati bahwa kebijakan resmi seperti Standard Operating Procedure (SOP) diperlukan untuk mengurangi jumlah kekerasan tersebut. Namun, terdapat perdebatan dan celah konseptual (*research gap*) ketika menganalisis ruang pendidikan Islam berbasis pesantren yang menerapkan segregasi gender total. Di satu sisi, pemisahan ruang ini terbukti efektif meminimalisasi pelecehan heteroseksual. Di sisi lain, para sarjana sering kali mengabaikan kerentanan domestik asrama homogen yang berpotensi memicu kekerasan seksual sesama jenis akibat tingginya intensitas interaksi harian yang tak terhindarkan.

Perspektif feminis kritis hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mendekonstruksi relasi kuasa (*power relation*). Teori ini tidak hanya melihat teks kebijakan perlindungan anak secara normatif, melainkan mengkritisi bagaimana tubuh dikontrol dan bagaimana doktrin kepatuhan tradisional (seperti kepatuhan santri kepada guru/kiai) rawan disalahgunakan oleh oknum predator. Studi terdahulu cenderung terjebak pada dikotomi hitam-putih dalam melihat

pesantren pasca-maraknya pemberitaan media. Penelitian ini memosisikan diri untuk mengeksplorasi bagaimana sebuah institusi, secara spesifik MA Ummul Qura Pondok Cabe, menegosiasikan kebijakan anti-kekerasan seksual di tengah tantangan spasial dan hierarki budaya keagamaan.

Berdasarkan kesenjangan literatur yang diidentifikasi di atas, penelitian ini diarahkan oleh dua pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana MA Ummul Qura Pondok Cabe memformulasikan dan mengimplementasikan SOP pencegahan kekerasan seksual untuk mengatasi kerentanan di ruang tersegregasi dan mendekonstruksi relasi kuasa?
2. Bagaimana mekanisme penanganan dan penegakan hukum yang diterapkan institusi terhadap tindakan kekerasan seksual yang melibatkan sesama jenis maupun oknum pendidik?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi kebijakan. Desain ini digunakan untuk melihat secara mendalam cara kebijakan resmi seperti SOP dan kode etik dibuat, diartikan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pelaku di sekolah, bukan hanya memandang kebijakan sebagai teks yang mati di atas kertas.

Penelitian tersebut dilakukan di Sekolah Menengah Atas Ummul Qura, Pondok Cabe. Subjek penelitian (informan) dipilih dengan cara pengambilan sampel yang sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria partisipasi langsung dalam penyusunan atau pelaksanaan kebijakan. Informan utama mencakup Kepala Madrasah, pengurus Asrama atau Pesantren, Dewan Guru, serta perwakilan dari Santri Putra dan Santri Putri. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (instrumen manusia) yang didukung oleh:

- *Protokol Wawancara Mendalam*: Digunakan untuk memahami lebih dalam pandangan informan mengenai batas-batas ketaatan yang ditaati santri, kesensitifan terhadap isu gender, serta cara-cara melaporkan kekerasan yang terjadi.
- *Lembar Observasi Partisipan*: Digunakan untuk mengamati pola segregasi spasial, interaksi di lingkungan asrama, dan mekanisme pengawasan harian.
- *Studi Dokumentasi*: Digunakan untuk membedah dokumen tertulis SOP tata tertib siswa, kode etik guru, serta dokumen publikasi aturan institusi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi harian di lingkungan madrasah dan asrama, diikuti dengan sesi wawancara mendalam yang direkam menggunakan perangkat audio atas persetujuan informan. Data dianalisis menerapkan kerangka analisis feminis kritis yang berfokus pada dekonstruksi teks kebijakan dan relasi kuasa. Prosedur analisis data meliputi reduksi data (*transkripsi rekam suara*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kepercayaan data (*trustworthiness*), peneliti menerapkan triangulasi sumber (membandingkan data wawancara guru, santri, dan pengurus) serta triangulasi metode (mengonfirmasi teks dokumen dengan realitas observasi lapangan).

HASIL

Hasil analisis data menunjukkan secara obyektif dan sistematis mengenai strategi yang diterapkan oleh MA Ummul Qura Pondok Cabe, yang dikelompokkan berdasarkan dua tema utama sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Formulasi SOP dan Mitigasi Kerentanan Spasial (Pencegahan)

Berdasarkan analisis dokumen dan observasi, MA Ummul Qura secara ketat menerapkan segregasi gender total berupa pemisahan asrama dan aktivitas harian santri laki-laki dan

perempuan. Pemisahan ruang ini terbukti mereduksi potensi pelecehan heteroseksual. Namun, untuk mengantisipasi kerentanan akibat interaksi yang kurang beragam di asrama yang bisa memicu kekerasan antar sesama jenis, pihak madrasah membuat SOP Tata Tertib dan Kode Etik Siswa yang lengkap.

Aturan ini jelas melarang segala bentuk kekerasan fisik, perundungan, atau tindakan merendahkan orang secara seksual, tanpa membedakan jenis kelamin. Parameter keberhasilan dalam menerapkan SOP ini ditentukan oleh sejauh mana seluruh warga sekolah mematuhi setiap aturan yang telah diterbitkan secara transparan. Selain itu, melalui proses belajar, institusi melakukan pelepasan hubungan kekuasaan yang tradisional dengan memberikan pemahaman baru kepada santri bahwa ketaatan kepada guru atau kiai bukanlah something yang mutlak.

Santri diajarkan untuk berani menolak perintah dan melaporkannya apabila tindakan oknum pendidik tersebut sudah melanggar norma hukum atau mengarah pada kemaksiatan/kekerasan seksual.

Mekanisme Penanganan Kasus dan Ketegasan Sanksi

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki beberapa prosedur yang saling terhubung dan mampu merespons dengan cepat. Ketika ada laporan tentang pelanggaran, pihak sekolah memperhatikan situasi, kondisi, dan masa depan anak dalam memutuskan tindakan pembinaan yang akan diambil. Namun, untuk pelanggaran berat yang sudah melewati batas moral, institusi memberlakukan sanksi yang sangat keras untuk menghentikan ruang aman bagi pelaku.. Data tindakan penanganan disajikan secara struktural pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kategori Pelanggaran Dan Mekanisme Sanksi Institusi

Kategori Pelanggaran	Subjek Terlibat	Mekanisme Penanganan & Sanksi Internal	Implikasi Hukum Lanjutan
Pelecehan Verbal / Perundungan Ringan	Antarmurid	Asesmen situasi, pemanggilan orang tua, tindakan pembinaan adaptif	Evaluasi internal perilaku murid
Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Asrama	Antarmurid	Pemberian hukuman berat hingga sanksi dikeluarkan dari lembaga	Pelaporan ke jalur kepolisian jika melanggar pidana
Pelanggaran Kode Etik & Otoritas Kuasa	Oknum Guru ke Murid	Pemecatan secara tidak hormat dan pencabutan hak mengajar	Penyerahan kasus sepenuhnya ke jalur hukum kepolisian

Berdasarkan Tabel 1, institusi menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan antar sesama jenis maupun kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru, dengan sanksi tertinggi berupa pemberhentian atau pengusiran dari lembaga tersebut. Jika kasus yang terjadi memenuhi unsur tindak pidana berat seperti pencabulan atau pemerkosaan, MA Ummul Qura secara tegas mengalihkan penanganan kasus tersebut dari lingkup domestik ke sistem hukum negara dengan cara melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian. Terakhir, guna mengkonter generalisasi negatif dari media massa yang kerap merugikan citra pesantren akibat perbuatan oknum individu, institusi menerapkan strategi manajemen reputasi dengan menonjolkan capaian prestasi santri serta transparansi kode etik yang berlaku di sekolah.

PEMBAHASAN

Interpretasi terhadap temuan di MA Ummul Qura Pondok Cabe menunjukkan bahwa strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di institusi tersebut mencerminkan suatu bentuk akomodasi sekaligus dekonstruksi kritis terhadap relasi kuasa. Melalui kacamata feminis kritis, kebijakan segregasi gender total (spasial) yang diterapkan tidak dipandang secara simplistik sebagai pemisahan fisik semata, melainkan sebagai bentuk regulasi institusional terhadap tubuh untuk memutus rantai potensi kekerasan heteroseksual. Hal ini sejalan dengan tesis Michel Foucault (1977) mengenai *docile bodies*, di mana institusi modern menggunakan ruang dan disiplin untuk mengatur perilaku individu.

Namun, temuan penelitian ini membawa pembaruan konseptual terhadap literatur terdahulu. Jika studi dari sarjana seperti Qowaid (2018) atau Wahid (2019) kerap kali melihat pemisahan gender di pesantren sebagai jaminan mutlak ruang aman, studi etnografi kebijakan ini menunjukkan adanya kerentanan baru yang bersifat homososial/homoseksual di ruang domestik asrama yang homogen (Nawas 2024). MA Ummul Qura merespons dinamika ini bukan dengan penyangkalan (*denial*), melainkan melalui penerbitan SOP Tata Tertib dan Kode Etik Siswa yang netral gender dan non-bias. Penegakan aturan ini membantah kritik feminis radikal konvensional yang sering menganggap lembaga keagamaan cenderung menutupi kekerasan sesama jenis demi menjaga nama baik korps. Parameter keberhasilan yang diukur dari transparansi dan kepatuhan publikasi aturan membuktikan adanya pergeseran ke arah tata kelola kebijakan yang akuntabel.

Signifikansi teoretis paling kuat dari temuan ini terletak pada dekonstruksi doktrin relasi kuasa *patron-client* antara guru/kiai dan santri. Dalam kultur pesantren tradisional, kepatuhan (*ta'at*) menempati posisi sakral yang sering kali disalahgunakan oleh oknum predator seks untuk melanggengkan opresi dan membungkam korban (Srimulyani, 2012). MA Ummul Qura memotong akar opresi ini dengan menanamkan ideologi hukum Islam yang progresif: ketaatan tidak bersifat absolut jika perintah tersebut mengarah pada kemaksiatan (*la tha'ata li mahlukin fi ma'shiyatil khaliq*). Pendekatan ini memberikan agensi dan kekuatan suara kepada santri—sebuah prinsip utama dalam pedagogi kritis dan feminisme kritis (Hooks, 1994)—untuk berani menolak dan melaporkan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh figur otoritas.

Dalam aspek penanganan, kebijakan institusi yang menolak penyelesaian "secara kekeluargaan" untuk kasus pidana berat dan langsung mengalihkannya ke jalur kepolisian merupakan lompatan praktis yang penting. Kebijakan *zero tolerance* dengan sanksi pemecatan guru atau pengeluaran murid membuktikan bahwa sekolah menempatkan keadilan korban di atas reputasi institusional. Sementara itu, strategi sekolah dalam menonjolkan prestasi dan keunggulan kurikulum untuk mengkonter generalisasi negatif media massa merupakan bentuk *counter-hegemony* (Gramsci, 1971) terhadap wacana publik. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi kekerasan seksual di sekolah berbasis agama memerlukan integrasi antara ketegasan hukum formal, penataan ruang yang berbasis evaluasi risiko, dan pengondisian budaya yang memberikan hak perlindungan penuh pada tubuh anak.

SIMPULAN

Penelitian etnografi kebijakan ini menyimpulkan bahwa MA Ummul Qura Pondok Cabe berhasil merumuskan strategi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang responsif melalui integrasi manajemen ruang tersegregasi dan penguatan SOP formal yang transparan. Studi ini memberikan kontribusi signifikan bagi kajian feminis kritis dengan menunjukkan bahwa sekolah mampu mendekonstruksi relasi kuasa patronal yang opresif; institusi secara aktif meredefinisikan doktrin ketaatan santri agar tidak bersifat mutlak ketika berhadapan dengan penyimpangan moral atau pelecehan oleh oknum pendidik. Keberanian institusi menerapkan

prinsip *zero tolerance*—yang diwujudkan melalui sanksi pengeluaran, pemecatan, hingga pelaporan langsung ke pihak kepolisian tanpa bias gender—membuktikan komitmen pemulihan yang berorientasi penuh pada keadilan korban serta pemutusan ruang aman bagi pelaku kekerasan sesama jenis maupun lintas jenis. Implikasi kebijakan ini menyarankan pentingnya bagi institusi pendidikan keagamaan lain untuk mengadopsi dekonstruksi budaya kepatuhan dan keterbukaan hukum serupa, seraya merekomendasikan penelitian masa depan untuk menguji efektivitas psikologis jangka panjang dari penerapan SOP anti-kekerasan ini terhadap penyintas di lingkungan homogen.

REFERENSI

- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Penguin Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Hooks, B. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom*. Routledge.
- Qowaid, Q. (2018). Seksualitas di pesantren: Antara teks kebijakan dan praktik sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, *7*(2), 145-160.
- Srimulyani, E. (2012). *Women in Indonesian Islamic lives: Gender and piety in the pesantren world*. Routledge.
- Nawas, A., Darmawan, I., & Maadad, N. (2024). Single-sex “Pesantren” schools: Unravelling girls’ and boys’ peer connections and their impacts on wellbeing and learning outcomes.